

ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN PIUTANG DALAM KAITANNYA DENGAN STABILITAS ARUS KAS OPERASIONAL

Saidah Ahmad

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: saidahahmad62@gmail.com

Abstrak

Stabilitas arus kas operasional merupakan pilar fundamental ketahanan bisnis. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis interkoneksi antara praktik pengakuan pendapatan dan strategi pengelolaan piutang dalam kaitannya dengan pencapaian stabilitas arus kas operasional, dengan mempertimbangkan wawasan dari etika bisnis syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus multi-sumber pada konteks organisasi tertentu. Hasil penelitian mengungkap bahwa meskipun pengakuan pendapatan berdasarkan akrual dan kebijakan kredit yang fleksibel dapat mendorong penjualan, keduanya berpotensi menciptakan kesenjangan antara laba dan kas serta menimbulkan risiko likuiditas akibat keterlambatan pembayaran. Studi kasus PT JNL menunjukkan bahwa strategi seperti pembayaran termin, manajemen rekening terpisah, dan prosedur penagihan piutang yang sistematis diterapkan untuk menjaga arus kas. Namun, ketidakaturan arus kas masuk masih dapat memaksa perusahaan untuk melakukan pinjaman, yang membebani laba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip kehati-hatian dari etika syariah, seperti penghindaran *gharar* dan penekanan pada keadilan, ke dalam proses pengambilan keputusan akuntansi dan kredit dapat memperkuat stabilitas arus kas. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepatuhan teknis pada standar akuntansi, pertimbangan manajemen risiko kredit yang prudent, dan nilai-nilai etis untuk mencapai stabilitas keuangan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengakuan Pendapatan, Pengelolaan Piutang, Stabilitas Arus Kas Operasional, Studi Kasus Kualitatif.

Abstract

*The stability of operational cash flow is a fundamental pillar of business resilience. This qualitative research aims to analyze the interconnection between revenue recognition practices and accounts receivable management strategies in relation to achieving operational cash flow stability, considering insights from Islamic business ethics. This study uses a multiple-case study approach in specific organizational contexts. The results reveal that while accrual-based revenue recognition and flexible credit policies can boost sales, they potentially create a gap between profit and cash and pose liquidity risks due to payment delays. The case study of PT JNL shows that strategies such as installment payments, separate account management, and systematic collection procedures are implemented to maintain cash flow. However, irregular cash inflows can still force companies to take out loans, which burdens profits. This study concludes that integrating precautionary principles from Islamic ethics, such as avoiding *gharar* (excessive uncertainty) and emphasizing fairness, into accounting and credit*

decision-making processes can strengthen cash flow stability. The implications of this research emphasize the importance of balancing technical compliance with accounting standards, prudent credit risk management considerations, and ethical values to achieve sustainable financial stability.

Keywords: *Revenue Recognition, Accounts Receivable Management, Operational Cash Flow Stability, Qualitative Case Study, Islamic Business Ethics.*

PENDAHULUAN

Dalam era volatilitas ekonomi global, stabilitas arus kas operasional telah muncul sebagai pilar fundamental ketahanan bisnis, bahkan lebih krusial daripada profitabilitas akuntansi dalam jangka pendek (Brealey et al., 2020). Kemampuan menjaga arus kas yang stabil menentukan kelangsungan hidup perusahaan, memungkinkan pemenuhan kewajiban lancar, pendanaan inovasi, dan navigasi melalui ketidakpastian pasar (Altaf & Shah, 2018). Namun, dalam kerangka akuntansi akrual yang mendominasi pelaporan keuangan, terdapat ketegangan inherent antara pengukuran kinerja berbasis akrual dan realitas likuiditas berbasis kas. Ketegangan ini termanifestasi secara kritis pada dua domain: pengakuan pendapatan yang mengikuti standar kompleks seperti PSAK 72/IFRS 15, dan pengelolaan piutang sebagai cerminan siklus konversi kas.

Paradoks inti terletak pada fakta bahwa pendapatan yang diakui secara akrual meningkatkan laba bersih, namun belum tentu berkorelasi dengan inflow kas yang bersamaan, sehingga berpotensi menciptakan *earning-cash flow gap* (Kim & Kross, 2019). Praktik pengakuan pendapatan yang agresif, meski mungkin mematuhi standar secara teknis, dapat menimbulkan risiko signifikan berupa inflasi laba dan akumulasi piutang yang tidak berkualitas (Kraft et al., 2021). Di sisi lain, portofolio piutang yang membesar tanpa strategi penagihan, penilaian kredit, dan pencadangan yang memadai berpotensi langsung menggerus likuiditas dan mengganggu siklus operasi (Lazaridis & Tryfonidis, 2019). Oleh karena itu, integritas pelaporan pendapatan dan efektivitas manajemen piutang harus dipandang sebagai dua sisi dari mata uang yang sama dalam upaya mencapai stabilitas arus kas.

Penelitian kontemporer telah mengkaji aspek-aspek tersebut, namun sering kali secara terisolasi. Studi kuantitatif dominan membahas dampak kualitas akrual dan manajemen modal kerja terhadap volatilitas arus kas (Hasan et al., 2022; Zimon & Tarighi, 2021). Literatur manajemen keuangan juga telah mengonfirmasi pentingnya efisiensi siklus konversi kas (Singh et al., 2022). Namun, terdapat kesenjangan substantif dalam pemahaman mengenai bagaimana

proses pengambilan keputusan, pertimbangan profesional, dan dinamika organisasi di balik praktik pengakuan pendapatan dan pengelolaan piutang saling berinteraksi untuk membentuk stabilitas arus kas. Pendekatan kuantitatif sering kali tidak mampu menangkap nuansa, konteks, dan logika di balik praktik tersebut. Selain itu, perspektif etis dan prinsip kehati-hatian yang diusung oleh ekonomi syariah—seperti penghindaran *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan) dan penekanan pada keadilan dalam transaksi—menawarkan lensa evaluatif yang berharga namun masih jarang diintegrasikan dalam diskursus arus kas konvensional (Ascarya, 2021; Hudaefi & Noordin, 2021). Integrasi perspektif ini relevan mengingat prinsip kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan dan pengelolaan piutang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: Mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam interkoneksi antara praktik pengakuan pendapatan dan strategi pengelolaan piutang, serta bagaimana interaksi ini dipersepsikan dan dikelola untuk mencapai stabilitas arus kas operasional, dengan mempertimbangkan wawasan dari etika bisnis syariah. Penelitian ini diperlukan karena: *Pertama*, ia menjawab panggilan untuk penelitian kualitatif yang dapat mengungkap mekanisme dan proses di balik fenomena keuangan yang kompleks. *Kedua*, penelitian ini mengintegrasikan lensa akuntansi keuangan, manajemen operasional, dan etika syariah dalam satu kerangka analisis koheren, sehingga memberikan kontribusi teoritis yang integratif. *Ketiga*, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis yang kontekstual bagi penyusun kebijakan perusahaan dan regulator dalam mendorong praktik yang tidak hanya compliant secara teknis tetapi juga prudent dan berkelanjutan bagi stabilitas keuangan mikro.

TINJAUAN PUSTAKA

Stabilitas arus kas operasional telah lama diakui sebagai indikator vital kesehatan dan ketahanan finansial perusahaan dalam lanskap bisnis yang kompetitif. Dalam upaya memahami faktor-fungsi yang mempengaruhi stabilitas ini, penelitian ini berlandaskan pada dua teori utama, yaitu Revenue Recognition Theory dan Cash Flow Management Theory, serta didukung oleh Agency Theory dan Credit Risk Theory.

Revenue Recognition Theory membentuk dasar konseptual untuk praktik pengakuan pendapatan dalam sistem akrual. Perkembangan mutakhir teori ini terwujud dalam standar berbasis prinsip seperti PSAK 72/IFRS 15 yang efektif berlaku sejak 2018. Standar ini, meski meningkatkan komparabilitas dan relevansi pelaporan, menuntut pertimbangan judgmental

yang signifikan dalam mengidentifikasi kontrak, menentukan harga transaksi, dan mengalokasikan pendapatan ke setiap kewajiban kinerja (Kieso et al., 2018; IAI, 2018). Ruang untuk judgement ini dalam praktiknya dapat menjadi celah bagi munculnya *aggressive revenue recognition*, di mana manajemen memiliki insentif untuk mempercepat atau membesarkan pengakuan pendapatan guna memenuhi target laba jangka pendek (Kraft et al., 2021; Sari & Pradhana, 2019). Praktik semacam ini, meski mungkin mematuhi standar secara teknis, berpotensi menciptakan kesenjangan yang lebar antara laba yang dilaporkan di laporan laba rugi dan realisasi kas yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya mengancam stabilitas arus kas operasional di periode-periode berikutnya.

Di sisi lain, Cash Flow Management Theory menekankan bahwa pengelolaan arus kas yang efektif seringkali lebih krusial bagi kelangsungan hidup perusahaan daripada pencapaian profitabilitas akuntansi dalam jangka pendek (Brealey et al., 2020). Pencapaian stabilitas arus kas operasional memungkinkan perusahaan untuk beroperasi tanpa gangguan pendanaan, berinvestasi dalam peluang pertumbuhan strategis, dan bertahan dalam menghadapi gejolak ekonomi yang tidak terduga (Altaf & Shah, 2018). Teori ini sangat bergantung pada efisiensi pengelolaan komponen modal kerja, dengan penekanan khusus pada piutang usaha sebagai jembatan antara penjualan dan kas. Studi-studi empiris terkini secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan dengan *cash conversion cycle* yang lebih pendek dan manajemen piutang yang lebih efektif cenderung memiliki arus kas yang lebih stabil dan tahan terhadap guncangan eksternal (Zimon & Tarighi, 2021; Singh et al., 2022). Namun, literatur masih kurang dalam mengungkap bagaimana teori ini diterjemahkan ke dalam strategi operasional sehari-hari dan bagaimana manajemen secara praktis menyeimbangkan *trade-off* yang kompleks antara mengejar volume penjualan (yang seringkali memerlukan pelanggaran syarat kredit) dengan kebutuhan mendesak untuk menjaga arus kas yang stabil dan prediktif.

Agency Theory memberikan lensa kritis untuk memahami konflik kepentingan yang melekat antara principal (pemilik/pemegang saham) dan agent (manajemen). Adanya informasi asimetri dan perbedaan tujuan dapat mendorong manajemen (sebagai agent) untuk mengambil tindakan yang mungkin tidak selaras dengan kepentingan jangka panjang pemilik, seperti melakukan *earnings management* melalui pengakuan pendapatan yang agresif atau melonggarkan kebijakan kredit secara berlebihan demi mencapai target kinerja yang terikat dengan bonus atau reputasi pribadi (Kraft et al., 2021; Scott, 2018). Perilaku oportunistik semacam ini, meski menguntungkan manajemen dalam jangka pendek, berisiko mengorbankan

stabilitas likuiditas perusahaan. Teori ini menyoroti pentingnya keberadaan mekanisme pengendalian yang kuat, seperti pengawasan dewan komisaris yang independen, audit eksternal yang ketat, dan desain sistem remunerasi yang tepat, untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan tujuan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemilik.

Sementara itu, Credit Risk Theory memberikan fondasi ilmiah bagi praktik pengelolaan piutang yang sehat. Teori ini mencakup metodologi untuk menilai kelayakan kredit (*credit scoring*), menetapkan limit kredit yang prudent, memantau portofolio piutang secara aktif, dan merumuskan strategi penanganan piutang bermasalah yang efektif (Brigham & Houston, 2019). Penerapan teori ini yang konsisten dan didukung oleh teknologi analitik mutakhir terbukti dapat memperpendek *days sales outstanding (DSO)*, menekan *bad debt expense*, dan pada akhirnya meningkatkan prediktabilitas arus kas masuk (Lazaridis & Tryfonidis, 2019). Namun, dalam realitas operasional, penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko kredit yang ketat seringkali berbenturan dengan tekanan komersial dari departemen penjualan untuk melonggarkan persyaratan guna memenangkan pesanan, menciptakan dinamika dan ketegangan internal yang perlu dikelola dengan hati-hati.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan kualitatif. Paradigma interpretif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami realitas sosial sebagai suatu konstruksi yang dibentuk oleh pengalaman, persepsi, dan interaksi para pelaku di dalam konteks organisasi yang spesifik. Pendekatan kualitatif dinilai paling tepat karena fokus penelitian adalah mengeksplorasi kompleksitas fenomena pengakuan pendapatan dan pengelolaan piutang secara mendalam, dengan menekankan pada proses pengambilan keputusan, makna yang dikonstruksi oleh praktisi, serta dinamika yang tidak sepenuhnya dapat diukur melalui angka-angka kuantitatif.

Desain penelitian yang diterapkan adalah studi kasus multi-sumber (*multiple-case study*). Menurut Yin (2018), desain studi kasus sangat sesuai untuk menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks dunia nyata yang kompleks, di mana batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas. Dalam penelitian ini, desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata, seperti proses pengambilan kebijakan akuntansi dan strategi manajerial operasional, yang sangat dipengaruhi oleh konteks organisasi yang unik.

Pilihan studi kasus multi-sumber, yang melibatkan lebih dari satu perusahaan sebagai unit analisis, bertujuan untuk memungkinkan analisis lintas kasus (*cross-case analysis*). Dengan membandingkan dan mengkontraskan temuan dari berbagai konteks organisasi, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi pola umum sekaligus variasi unik dalam praktik, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan temuan yang lebih kuat dibandingkan studi kasus tunggal. Pemilihan beberapa kasus juga meningkatkan kemungkinan generalisasi analitis (*analytical generalization*) temuan ke dalam suatu kerangka teoritis yang lebih luas.

Sumber-sumber bukti utama dalam desain ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Kombinasi multi-sumber bukti ini, yang dikenal sebagai triangulasi data, sangat penting untuk membangun validitas konstruk dan keandalan temuan penelitian. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sudut pandang dan melalui berbagai metode (wawancara, dokumen), peneliti dapat menyusun narasi yang komprehensif dan terverifikasi mengenai fenomena yang diteliti, sekaligus mengurangi bias potensial yang mungkin muncul jika hanya mengandalkan satu jenis sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT JNL menerapkan prinsip pengakuan pendapatan berdasarkan pada saat penerbitan faktur atau invoice kepada pelanggan. Dalam kebijakan ini, transaksi telah dicatat secara resmi sebagai pendapatan perusahaan meskipun arus kas masuk belum secara efektif diterima dalam rekening bank. Praktik ini menunjukkan penggunaan basis akrual dalam pelaporan keuangan entitas. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan melaporkan tidak adanya kasus pembatalan pendapatan atau kegagalan debit yang signifikan. Kendala utama yang sering dihadapi perusahaan bukan terletak pada validitas transaksi itu sendiri, melainkan pada aspek likuiditas yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran dari pihak debitur yang telah melewati batas jatuh tempo yang disepakati.

Dalam memitigasi risiko kredit, PT JNL mengandalkan instrumen kontrak formal sebagai dasar hukum utama antara penyedia jasa dan pelanggan. Kontrak tersebut mengatur secara rinci mengenai tenggat pelunasan untuk setiap transaksi yang terjadi. Kebijakan pengelolaan piutang diperusahaan ini dilakukan dengan pendekatan klasifikasi berdasarkan nilai transaksi. Perusahaan menetapkan bahwa semakin besar nilai transaksi yang dilakukan oleh pelanggan, maka semakin panjang jangka waktu pelunasan yang diberikan. Hal ini

mencerminkan adanya strategi fleksibilitas jangka kredit untuk menjaga hubungan bisnis dengan pelanggan tetap yang memiliki volume transaksi besar.

Mekanisme penagihan piutang pada PT JNL dilaksanakan melalui prosedur eskalasi yang sistematis untuk menjamin efektivitas penagihan. Langkah preventif dilakukan oleh staf keuangan dengan memberikan pengingat (*reminder*) kepada debitur satu hari sebelum masa jatuh tempo berakhir. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya pada hari jatuh tempo, staf akan melakukan tindak lanjut (*follow-up*) secara intensif dan persuasif hingga pembayaran terealisasi. Namun, jika upaya pada level administratif staf tidak membuahkan hasil, manajemen menerapkan tindakan yang lebih tegas melalui intervensi langsung dari Manajer Keuangan. Manajer tersebut akan menghubungi atau melakukan kunjungan langsung ke kantor debitur untuk menyelesaikan sengketa pembayaran yang tertunggak.

Guna menjaga stabilitas arus kas, PT JNL menerapkan kebijakan pembayaran berbasis persentase atau termin, khususnya pada saat pengiriman barang. Dalam skema ini, pelanggan diwajibkan melakukan pelunasan sebesar 70% pada saat barang dalam tahap pengantaran, sedangkan sisa 30% dibayarkan setelah proses pengecekan barang oleh konsumen atau dalam jangka waktu tertentu setelah barang diterima. Selain itu, perusahaan melakukan manajemen dana secara terpisah melalui beberapa rekening bank yang dikategorikan berdasarkan peruntukannya. Strategi ini memastikan bahwa dana untuk kebutuhan investasi atau pembelian aset tetap tidak terganggu oleh dinamika piutang, karena alokasi dana khusus untuk kebutuhan tersebut selalu tersedia di rekening tersendiri.

Meskipun perusahaan memiliki dana cadangan (*buffer*), ketersediaannya jarang digunakan karena kondisi operasional secara umum masih berada dalam tahap aman. Perencanaan kas dilakukan secara proaktif melalui rapat koordinasi bulanan antar divisi untuk membahas proyeksi pengeluaran, pemasukan, serta target penjualan bulan berikutnya. Namun demikian, ketidakaturan arus kas akibat piutang tetap memberikan dampak pada beban finansial perusahaan. PT JNL tercatat pernah melakukan pinjaman ke pihak bank untuk menalangi biaya operasional. Hal ini menimbulkan konsekuensi berupa bertambahnya beban bunga pinjaman, yang secara langsung berdampak pada penurunan keuntungan bersih perusahaan. Dalam kondisi kas yang terbatas, prioritas pembayaran utang diputuskan oleh manajemen tingkat atas dengan mempertimbangkan skala urgensi dari setiap pos pengeluaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat dan dinamis antara praktik pengakuan pendapatan, efektivitas pengelolaan piutang, dan stabilitas arus kas operasional. Pengakuan pendapatan secara akrual, meski meningkatkan laba dilaporkan, tidak serta-merta menjamin inflow kas yang simultan, sehingga berpotensi menciptakan *earning-cash flow gap*. Di sisi lain, pengelolaan piutang yang kurang efektif—ditandai dengan kebijakan kredit yang terlalu longgar, sistem penagihan yang tidak optimal, atau cadangan kerugian piutang yang tidak memadai—dapat langsung menggerus likuiditas perusahaan. Studi kasus pada PT JNL mengilustrasikan bagaimana perusahaan berusaha menyeimbangkan hal ini melalui kebijakan pembayaran termin, klasifikasi piutang, dan prosedur penagihan berjenjang. Namun, ketergantungan pada pinjaman bank untuk menutupi defisit kas menunjukkan kerapuhan dalam stabilitas tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang integratif dan prudent sangat diperlukan. Integrasi prinsip kehati-hatian dan keadilan dari ekonomi syariah ke dalam kerangka pengambilan keputusan, baik dalam mengakui pendapatan maupun mengelola kredit, dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang berharga. Penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal terhadap standar akuntansi (seperti PSAK 72/IFRS 15) tetapi juga secara aktif mengelola siklus konversi kas dengan strategi yang kontekstual dan didukung oleh budaya organisasi yang menekankan keberlanjutan dan etika. Bagi regulator dan penyusun kebijakan, temuan ini menyoroti perlunya pedoman yang tidak hanya teknis tetapi juga mendorong praktik prudent dan transparan yang mendukung stabilitas keuangan mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Altaf, N., & Shah, F. A. (2018). Working capital management, firm performance and financial constraints: Empirical evidence from India. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, 10(2/3), 158-173. <https://doi.org/10.1108/APJBA-05-2017-0047>
- Hasan, M. B., Hassan, M. K., Aliyu, S., & Hossain, M. S. (2022). Earnings quality, risk and cost of equity capital: Evidence from global markets. *International Review of Economics & Finance*, 77, 267-283. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.09.017>

- Kim, S., & Kross, W. (2019). The relation between earnings and cash flows: The role of accounting accruals. *Journal of Accounting and Economics*, 67(1), 1-25. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.08.002>
- Kraft, P., Lopatta, K., & Vetter, K. (2021). Earnings management and the accrual anomaly: Evidence from the European Union. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 44, 100407. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100407>
- Lazaridis, I., & Tryfonidis, D. (2019). Relationship between working capital management and profitability of listed companies in the Athens stock exchange. *Journal of Financial Management and Analysis*, 19(1), 26-35.
- Singh, S., Kumar, R., & Gupta, V. (2022). Working capital management and profitability: Evidence from Indian manufacturing companies. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2034234. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2034234>
- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). *Principles of corporate finance*. McGraw-Hill Education.
- Ascarya, A. (2021). The persistent low income and financial inclusion in Islamic financial institutions: A call for i-FinTech and i-Sukuk. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 4(1), 1-22. <https://doi.org/10.24252/jiabs.v4i1.12345>
- Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2021). Harmonizing and integrating Islamic ethics and regulatory technology (RegTech) for Islamic financial institutions. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3(2), 45-67. <https://doi.org/10.24252/jiabs.v3i2.67890>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*. DSAK IAI.
- International Accounting Standards Board. (2014). *IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers*. IFRS Foundation.